

**Implementasi Sistem Informasi Pasar Kerja Online (IpK Online) Di Dinas Sosial
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Brebes
Periode 2014-2015**

Oleh :
Helmy Ari Ghoni & Heriyani Agustina

Abstract

Research about Implementation of Online Labor Market Information System at Social Labor and Transmigration Agency of Brebes District started from ineffectiveness of how does the system implemented in order to give a employment service.

Researcher will observe the phenomenon using six indicator based on model from Van Meter and Van Horn that is standard and objectives of policy, supported resources, organizational communications, economic social and political conditions, acceptance of implementers and implementers diposition.

Researcher use descriptive qualitative method with expectation to be able to observe phenomenon experienced by participant accurately and to earn more understanding about implementation of Online Labor Market Information System at Sosial Labor and Transmigration Agency of Brebes District.

As result of this research, there are some problems from six indicators that is used to observe implementation of Online Lambor Market Information System. The problems are standard and objectives of policy, supprted resources, social and economic conditions and implementers disposition. As for the effort to solve the problems has not been able to resolve it.

Researcher concludes that Implementation of Online Labor Market Information System at Social Labor and Transmigration of Brebes District has not been effective if related with the indicators. Researchers suggestions are the need of strong commitment from the implementers to understand and to monitor the Implementation of Online Labor Market System.

Keywords : implementation, online labor market information system (IPK Online), effective

A. PENDAHULUAN

Permasalahan ketenagakerjaan selalu tumbuh dan berkembang, baik di negara maju maupun berkembang, hal itu terlihat dari adanya departemen yang menangani ketenagakerjaan pada setiap kabinet yang dibentuk. Namun setiap negara memiliki beragam masalah sehingga memunculkan berbagai alternatif solusi dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Umumnya, negara maju berkuat pada permasalahan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan mahalnya upah tenaga kerja, bertambahnya pengangguran karena mekanisasi (penggunaan mesin dan robot), dan tenaga kerja ilegal. Sementara itu, di negara berkembang umumnya permasalahan ketenagakerjaan terkait dengan kecilnya kesempatan kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya

kemampuan tenaga kerja, tingkat upah yang rendah, serta jaminan sosial yang hampir tidak ada.

Melihat permasalahan ketenagakerjaan yang demikian kompleks di atas, tentu membutuhkan pemecahan yang komprehensif. Hal ini disebabkan karena permasalahan ketenagakerjaan, bukan merupakan persoalan individu, yang bisa diselesaikan dengan pendekatan individual tetapi merupakan permasalahan sosial, pada akhirnya membutuhkan penyelesaian yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Permasalahan ketenagakerjaan berpangkal dari masalah pokok yaitu upaya pemenuhan kebutuhan hidup serta upaya meningkatkan kesejahteraan hidup. Pemenuhan kebutuhan pokok, baik kebutuhan akan barang, seperti pangan,

sandang dan papan maupun jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan adalah akar penyebab utama sekaligus faktor pendorong terjadinya permasalahan ketenagakerjaan. Terjadinya kelangkaan kesempatan kerja menyebabkan sebagian anggota masyarakat menganggur dan ini berdampak pada ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya untuk melakukan wirausaha terbentur dengan tidak adanya modal dan juga keterampilan yang memadai. Terjunnya kalangan wanita dan anak-anak ke dunia ketenagakerjaan tidak terlepas dari upaya mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya sekaligus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup.

Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2014 adalah 121.872.931 orang (berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2014). Angkatan kerja terbanyak adalah lulusan SD/tidak tamat SD/tidak bersekolah

sejumlah 55.649.637 orang (45,66%). Selanjutnya secara berturut-turut adalah lulusan SMA/SMK (26,58%), lulusan SMP (17,98%), Sarjana (7,19%) dan Diploma (2,58%). Dari jumlah angkatan kerja tersebut, yang bekerja sebanyak 114.628.026 orang (94,06%) dan berdasar tingkat pendidikan secara berturut-turut adalah lulusan SD/tidak tamat SD/tidak bersekolah (47,07%), lulusan SMA/SMK (25,39%), lulusan SMP (17,75%), Sarjana (7,21%) dan Diploma (2,58%). Angkatan kerja yang berstatus sebagai pengangguran terbuka sebanyak 7.244.905 orang (5,94%). Jumlah pengangguran terbuka yang paling banyak adalah lulusan SMA yaitu 1.962.786 orang (27,09%).

Pada tahun 2015 jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan sebesar 0,42% menjadi 122.380.021 orang (berdasar hasil Sakernas Agustus 2015). Dari jumlah tersebut yang bekerja sebanyak 114.819.199 orang (93,82%) dan yang berstatus sebagai pengangguran terbuka sebanyak 7.560.822 orang (6,18%). Jumlah pengangguran terbuka yang paling banyak adalah lulusan SMA/SMU yaitu 2.280.029 orang (30,16%).

Indonesia diprediksi akan mendapat Bonus Demografi pada tahun 2020-2030. Bonus Demografi adalah suatu kondisi dimana penduduk dengan umur produktif (15-65 tahun) sangat besar sementara usia muda (di bawah 14 tahun) semakin kecil dan usia lanjut (di atas 65 tahun) belum banyak. Pemerintah harus memiliki strategi pembangunan yang mampu menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan. Kemampuan tenaga kerja juga harus ditingkatkan diantaranya melalui pelatihan untuk memaksimalkan potensi dan kemampuan tenaga kerja. Lapangan kerja perlu dibuka untuk menampung

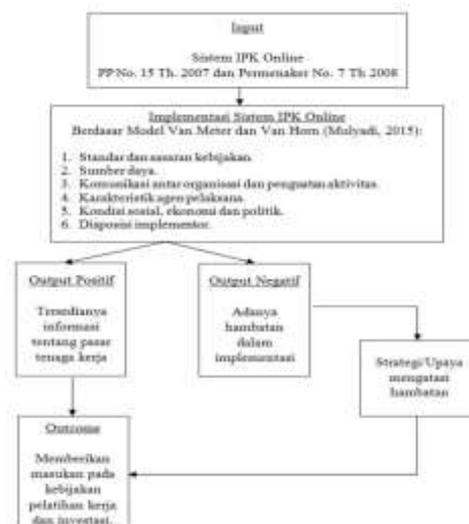
penduduk usia kerja di periode 2020-2030. Pembukaan lapangan kerja dapat dilakukan melalui investasi, industri padat karya, pertanian, industri kreatif serta industri kecil, mikro dan menengah. Sistem IPK Online akan dapat mempercepat pelayanan terhadap masyarakat yang ingin mengetahui kondisi pasar tenaga kerja, kemudian gambaran kondisi pasar tenaga kerja dalam Sistem IPK Online dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan mengatasi pengangguran.

Dinsosnakertrans Kabupaten Brebes belum sepenuhnya menggunakan IPK Online. Pelayanan penempatan tenaga kerja melalui Sistem IPK Online di Dinsosnakertrans Kabupaten Brebes memiliki beberapa permasalahan baik teknis maupun non teknis. Permasalahan teknis diantaranya adalah server di kementerian yang mengalami gangguan atau kendala dengan koneksi jaringan internet yang kurang memadai. Permasalahan non teknis antara lain keterbatasan informasi lowongan kerja dan kurang pahamnya masyarakat dan perusahaan akan cara kerja Sistem IPK Online. Berdasarkan Sakernas 2014 dan 2015, angkatan kerja Indonesia paling banyak adalah lulusan SD yang mana jumlahnya hampir mencapai 50%. Kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi informasi yang terbatas tentunya menjadi kendala dalam pelaksanaan Sistem IPK Online.

Sistem IPK Online diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai informasi pencari kerja, lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja. Namun apabila dilihat dari data 2014 dan 2015, masih terdapat kesenjangan antara jumlah penganggur terbuka yang ada dengan yang mendaftarkan diri sebagai pencari kerja di

Dinsosnakertrans. Pada 2014, berdasar data Sakernas bahwa penganggur terbuka di Kabupaten Brebes berjumlah 80.420 orang namun yang terdaftar sebagai pencari kerja sebanyak 12.314 orang. Pada 2015 data Sakernas menunjukkan bahwa pengangguran terbuka di Kabupaten Brebes berjumlah 53.261 orang, namun yang terdaftar sebagai pencari kerja sebanyak 12.386 orang. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya permasalahan dalam implementasi IPK Online. Duplikasi data pencari kerja terdaftar dapat terjadi karena pada periode tersebut Dinsosnakertrans Kabupaten Brebes masih menggunakan cara manual.

Kerangka Pemikiran



B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui implementasi IPK Online di Dinsosnakertrans Kabupaten Brebes adalah metode kualitatif deskriptif. Melalui metode penelitian kualitatif ini peneliti berharap dapat mengamati fenomena yang dialami partisipan atau pelaku dalam implementasi IPK Online di Dinsosnakertrans Kabupaten Brebes dengan seakurat mungkin. Penelitian ini bersifat deskriptif yang

menggunakan data-data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo dan dokumen-dokumen lainnya (Ahmad, 2015:53).

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti memilih informan dengan pertimbangan bahwa mereka adalah orang-orang yang terkait dengan permasalahan penelitian. Aspek yang menjadi pertimbangan adalah subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi secara lengkap dan akurat.

Operasional Parameter

Fokus Kajian	Indikator	Parameter
Implementasi IPK Online	Standar dan sarana kebijakan	a. Peraturan yang mendukung b. Sarana kebijakan
	Sumber daya	a. Petugas pelaksana b. Peralatan c. Pendanaan
	Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas	a. Komunikasi antar organisasi b. Komunikasi antar petugas pelaksana c. Sosialisasi
	Karakteristik agen pelaksana	a. Tingkat pendidikan b. Kemampuan c. Respon pelaksana d. Pencaer kerja
	Kondisi sosial, ekonomi dan politik	a. Ketersediaan lapangan kerja b. Respons implementor
Disposisi implementor	a. Respons implementor b. Persepsi akan kebijakan c. Intensitas disposisi implementor	

Berdasarkan Model Implementasi Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2015:72).

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data dimaksudkan untuk mengetahui apa yang terdapat di balik semua data tersebut, mengelompokkannya, meringkasnya menjadi suatu yang kompak dan mudah dimengerti, serta menemukan pola umum yang timbul dari data tersebut. Analisis data dalam penelitian kualitatif sudah dimulai sejak dari pengumpulan data. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik analisis data interaktif seperti yang dikemukakan Miles dan Huberman bahwa terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn mensyaratkan adanya standar kebijakan, yang dalam implementasi IPK Online ini sudah ada dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Permenaker. Ketersediaan Standar Operational Procedure (SOP) juga telah dipenuhi dalam rangka implementasi kebijakan. Namun ketiadaan peraturan di tingkat kabupaten membuat petugas pelaksana memilih menggunakan alternatif pelayanan secara manual. Peraturan di tingkat kabupaten dapat menjadi dasar dalam pengajuan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Sistem IPK Online.

Pemahaman akan sasaran kebijakan Sistem IPK Online masih kurang mendalam. Apabila informasi penempatan tenaga kerja tersedia dengan baik maka Dinsosnakertrans akan dapat memberikan gambaran mengenai informasi pasar tenaga kerja yang ada di Kabupaten Brebes. Hal tersebut dapat menjadi masukan dalam penentuan kebijakan yang terkait dengan ketenagakerjaan, pendidikan dan investasi di Kabupaten Brebes.

Jumlah petugas pelaksana yang ada di Dinsosnakertrans belum memenuhi kebutuhan. Proses yang ada saat ini ditangani oleh petugas yang juga melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kegiatan rutin yang ada di Dinsosnakertrans. Menurut Van Meter dan Van Horn Sumber Daya Manusia merupakan salah satu hal yang menentukan implementasi kebijakan. Sistem IPK Online memiliki beberapa

proses yang perlu dilaksanakan dengan jumlah SDM yang memadai. Kurangnya jumlah SDM dapat menjadikan proses yang ada dalam Sistem IPK Online tidak berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan Sistem IPK Online merupakan satu kesatuan dimana proses-proses yang ada di dalamnya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Apabila satu proses tidak berjalan maka Kebijakan Sistem IPK Online tidak akan dapat terlaksana.

Peralatan yang terkait dengan implementasi Sistem IPK Online ada yang bertempat di Dinsosnakertrans dan ada juga yang berada di Kementerian Tenaga Kerja. Sistem IPK Online yang terpusat sesuai dengan peraturan yang menyatakan bahwa sistem harus terintegrasi secara nasional. Sarana prasarana yang ada di Dinsosnakertrans masih belum memenuhi standar pelayanan secara online, kemudian server di pusat kadang mengalami perawatan sehingga sistem tidak dapat diakses. Kebijakan Sistem IPK Online merupakan kebijakan dari pusat namun kementerian sendiri masih kurang memberi perhatian terhadap ketersediaan sarana prasarana yang memenuhi standar.

Dinsosnakertrans Kabupaten Brebes belum memiliki sumber pendanaan yang memadai guna pelaksanaan Sistem IPK Online. Dana dekonsentrasi yang diberikan oleh Provinsi Jawa Tengah sebenarnya merupakan stimulan agar Pemerintah Kabupaten Brebes dalam hal ini adalah Dinsosnakertrans dapat mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan Sistem IPK Online di Kabupaten Brebes.

Upaya komunikasi antar organisasi telah dilakukan oleh Dinsosnakertrans untuk implementasi Sistem IPK Online. Namun komunikasi

dengan perusahaan mengenai informasi lowongan kerja justru dilakukan secara pasif. Komunikasi yang dilakukan petugas pelaksana sudah baik dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja, namun dalam kaitannya dengan implementasi Sistem IPK Online masih menjadi hambatan karena jumlah petugas hanya dua orang dan masih harus membagi tugas terkait dengan kegiatan rutin. Sosialisasi yang dilakukan baik kepada masyarakat maupun petugas pelaksana sudah dilaksanakan untuk kelancaran pelaksanaan Sistem IPK Online.

Sistem IPK Online yang menggunakan aplikasi berbasis internet membutuhkan petugas pelaksana yang memiliki kompetensi dalam bidang teknologi informasi. Dinsosnakertrans hanya memiliki satu orang pelaksana yang memiliki kemampuan tersebut sehingga pelaksanaan Sistem IPK Online tidak bisa berjalan dengan baik. Pemahaman akan tugas dan kompetensi atas Sistem IPK Online dapat dipenuhi di Dinsosnakertrans, namun terbatasnya jumlah petugas pelaksana menjadikan mereka memilih pelayanan dan pelaporan yang bersifat manual. Respon petugas pelaksana di Dinsosnakertrans mendukung implementasi Sistem IPK Online, namun petugas pelaksana menginginkan agar server bisa lancar dan stabil untuk kelancaran tugas mereka.

Pencari kerja lebih mengutamakan pembuatan kartu AK/I yang akan dipergunakan untuk melamar pekerjaan dibandingkan dengan mengetahui bahwa ada Sistem IPK Online di Dinsosnakertrans. Sistem IPK Online belum efektif untuk menampilkan informasi lowongan pekerjaan. Perusahaan lebih banyak mengirimkan surat ke

Dinsosnakertrans untuk menginformasikan lowongan pekerjaan. Dari hasil observasi terlihat bahwa informasi tersebut dipasang di papan pengumuman.

Van Meter dan Van Horn mengemukakan tiga jenis respon terhadap kebijakan yaitu mendukung, netral dan menolak. Menurut peneliti bahwa pendapat Kepala Dinsosnakertrans termasuk dalam respon yang mendukung kebijakan. Upaya yang dilakukan juga menunjukkan dukungan dalam implementasi Sistem IPK Online. Kondisi di Dinsosnakertrans bahwa Kepala Dinsosnakertrans telah memahami pelayanan penempatan tenaga kerja, namun belum memfasilitasi kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Sistem IPK Online. Intensitas disposisi implementor dilakukan dalam upaya untuk memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja, namun implementor belum menunjukkan adanya arahan dalam kaitannya dengan Sistem IPK Online.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasar kerangka pemikiran yang ada, implementasi Sistem IPK Online di Dinsosnakertrans di Dinsosnakertrans Kabupaten Brebes pada periode 2014-2015 belum terlaksana secara efektif. Setelah diteliti menggunakan indikator berdasarkan model Van Meter dan Van Horn, output implementasi Sistem IPK Online di Kabupaten Brebes masih menunjukkan output negatif dengan adanya hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga

outcome dari Sistem IPK Online belum bisa tercapai.

2. Hambatan-hambatan yang dialami meliputi :
 - a. Peraturan yang mendukung Sistem IPK Online di tingkat kabupaten belum ada.
 - b. Jumlah petugas pelaksana yang belum mencukupi.
 - c. Peralatan yang belum memadai.
 - d. Pendanaan Sistem IPK Online belum menggunakan APBD Kabupaten Brebes.
 - e. Kondisi sosial ekonomi dimana pencari kerja tidak menuntut sistem online dan lowongan kerja masih banyak di luar Pulau Jawa. Budaya masyarakat yang masih religius menghambat penyebaran tenaga kerja.
 - f. Kurangnya disposisi implementor.
3. Upaya-upaya yang telah dilakukan belum mampu mengatasi hambatan yang ada dalam pelaksanaan Sistem IPK Online di Dinsosnakertrans Kabupaten Brebes. Upaya tersebut lebih fokus pada penambahan jumlah petugas pelaksana, namun belum maksimal pada hambatan-hambatan yang lain.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka untuk dapat meningkatkan tercapainya tujuan dari implementasi IPK Online, ada beberapa saran yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Implementasi IPK Online memerlukan komitmen yang kuat dari implementor, dimana implementor harus memahami kebijakan dan selalu melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya serta memantau upaya untuk mengatasi hambatan agar lebih cepat diatasi. Implementasi IPK Online yang baik akan memberikan gambaran informasi pasar tenaga kerja di

Kabupaten Brebes, dimana informasi tersebut dapat memberikan masukan pada pembangunan yang ada di Kabupaten Brebes.

Pada salah satu indikator dari Van Meter dan Van Horn yang digunakan dalam meneliti implementasi Sistem IPK Online yaitu Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik, peneliti perlu menambahkan unsur Budaya sehingga menjadi Kondisi Sosial Budaya Ekonomi dan Politik. Budaya menjadi salah satu unsur yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Sistem IPK Online.

2. Hambatan-hambatan dalam Implementasi Sistem IPK Online di Dinsosnakertrans Kabupaten Brebes dapat diselesaikan secara bertahap yang diawali dengan komitmen, pemahaman dan disposisi implementor untuk melaksanakan Sistem IPK Online. Berikutnya dengan upaya menyusun peraturan yang mendukung pelaksanaan Sistem IPK Online, dimana peraturan tersebut dapat mendorong penyediaan anggaran dan penambahan petugas pelaksana.
3. Upaya mengatasi hambatan implementasi IPK Online berupa gangguan pada server dapat dilakukan dengan membuat sistem IPK Online lokal yang servernya berlokasi di Dinsosnakertrans kemudian diintegrasikan dengan server yang ada di pusat. Server lokal akan mempermudah pemeliharaan dan memperingan kerja dari server yang ada di pusat. Pembuatan sistem IPK Online dengan server lokal membutuhkan komitmen yang kuat dari implementor karena membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan memerlukan ijin dari pusat untuk

dapat diintegrasikan dengan sistem IPK Online nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Buku
- Abidin, Zainal Said, (2004), Kebijakan Publik, Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
- Ahmad, J, (2015), Metode Penelitian Administrasi Publik. Teori dan Aplikasi, Yogyakarta : Gava Media.
- Chandler, R.C. & Plano, J.C., (1998), The Public Administration Dictionary: Second Edition, Santa Barbara, CA: ABC-CLIO Inc.
- Dwiyanto, Agus dkk, (2006), Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta : Gadjah Mada University.
- Dye, Thomas R., (1992), Understanding Public Policy, New Jersey: Prentice Hall.
- Edward III, George C, (1980), Implementing Public Policy, Washington : Congressional Quarterly Inc.
- Frederickson, H. George, (1984), Administrasi Negara Baru, Jakarta : LP3S.
- Gie, The Liang, (1993), Pengertian, Kedudukan dan Perincian Administrasi, Yogyakarta : Liberty.
- Goggin, Malcolm L., Ann O'M. Bowman, James P. Lester dan Laurence J. O'Toole Jr, (1990), Implementation Theory and Practice: Toward A Third Generation, Glenview:Scott Foresman/Little Brown USA.
- Grindle, Merilee S. (Ed), (1980), Politics and Policy Implementation in The Third World, New Jersey : Princeton University Press.
- Gudono, (2015), Teori Organisasi (Edisi Ketiga), Yogyakarta : BPFE.

- Hardiyansyah, (2015), Komunikasi Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi, Yogyakarta : Gava Media.
- Henry, Nicholas, (1988), Administrasi Negara, diterjemahkan oleh Luciana D. Lontoh dari judul asli Public Administration and Public Affairs, Jakarta : Rajawali Pers.
- Keban, Yermias T., (2008), Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu, Yogyakarta : Gava Media.
- Mulyadi, D, (2015), Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan, Bandung : Alfabeta.
- Mulyadi, D, (2015), Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung : Alfabeta.
- Nakamura, Robert T., dan Smallwood, Frank, (1980), The Politics of Policy Implementation, New York : St. Martins.
- Nugroho, Riant, (2006), Kebijakan Publik : Untuk Negara-Negara Berkembang, Jakarta : Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Nurman, (2015), Strategi Pembangunan Daerah, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Pasolong, H., (2004), Teori Administrasi Publik, Bandung : Alfabeta.
- Purwanto, E.A. & Sulistyastuti, D.R., (2015), Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta : Gava Media.
- Rondinelli, D.A, J.R. Nellis ang Cheema, G.S., (1983), Decentralization in Developing Countries : A Review of Recent Experience, Washington D.C.: World Bank Staff Working Papers No. 581.
- Sastrohadiwiryo, S., (2005), Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Pendekatan Administrasi dan Operasional, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Siagian, P. Sondang, (2004), Filsafat Administrasi, Edisi Revisi, Jakarta : Bumi Aksara.
- Van Meter, D.S., & Van Horn, C.E., (1975), The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, Administration and Society, 6(4), Pp:445-488
- Winarno, B, (2015), Kebijakan Publik. Teori, Proses, dan Studi Kasus, Yogyakarta : CAPS.
- B. Jurnal dan Penelitian**
- Dariah, H.U., (2015), Studi tentang Pelayanan Informasi Pasar Kerja (IPK) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, ejournal.an.fisip-unmul : tidak diterbitkan.
- Nurlina, (--), Pasar Kerja dan Ketenagakerjaan, Jurnal Universitas Taman Siswa Padang : tidak diterbitkan.
- Saputri, O.D. & Rejekiningsih, T.W., (2011), Analisis Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Salatiga, eprints.undip.ac.id, Semarang : tidak diterbitkan.
- C. Laporan dan Makalah**
- Allen, E, & Kim, K.B., (2014), Indonesia : Sistem Informasi dan Layanan Pasar Tenaga Kerja. Paparan Teknis Lokakarya Teknis tentang Proyeksi Ketenagakerjaan dan Informasi tentang Pasar Tenaga Kerja, Jakarta : ILO.
- (--), 2014, Laporan Informasi Pasar Kerja Edisi : Tahun 2014, Brebes : Dinsosnakertrans Kabupaten Brebes.
- (--). 2015, Laporan Informasi Pasar Kerja Edisi : Tahun 2015, Brebes : Dinsosnakertrans Kabupaten Brebes.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Permenakertrans RI Nomor Per.07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

Permenakertrans RI Nomor Per.24/MEN/XII/2008 tentang Metode Penghitungan Persediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja.

Permenakertrans RI Nomor Per.19/MEN/IX/2009 tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan.

Permenakertrans RI Nomor Per.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro.

Permenakertrans RI Nomor Per.17/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Mikro.

E. Dokumen Elektronik

1. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2014, BPS Pusat.
2. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2015, BPS Pusat.
3. Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Tengah Hasil Sakernas Agustus 2014, BPS Provinsi Jawa Tengah.
4. Keadaan Angkatan Kerja Jawa Tengah Agustus 2015, BPS Provinsi Jawa Tengah